

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

A.1. Sejarah dan Pengertian Pidana Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.¹⁹

Pemidanaan adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran yang berat dan istilah pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

Sejarah mencatat bahwa ketika KUHP Indonesia mulai diberlakukan, berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegera Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 117

15 Oktober 1915, No. 33 Staatsblad 1915 No. 372 jo Staatsblad tahun 1917 No. 497 dan 645.²⁰

Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).²¹

Dalam KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan: Pidana Pokok terdiri dari:²²

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

²⁰ Pengertian Pidana Mati diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 01 Januari 2019. Pukul 23.WIB.

²¹ *Ibid*

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm25.

Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Sebagaimana Penulis sampaikan diawal bahwa dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti:

- a) Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP);
- b) Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP);
- c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP);
- d) Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP).

A.2. Pidana Mati & Relevansinya Dengan Tindak Pidana

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam penerapan vonis mati terhadap

pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.²³

Makamah konstitusi juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan, salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait; Implementasi pidana mati tidak harus langsung di eksekusi, tapi diberikan kesempatan 10 tahun untuk menunjukan bahwa dia patut diabolisi atau di ganti dengan penjara seumur hidup.

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

²³ Niko Kurniawan, Makalah Kriminologi, diakses dari <http://makalahkriminologi.blogspot.com/2011/07/perbedaan-hukuman-mati-seumur-hidup-dan.html>, pada tanggal 01 Januari 2019, Pukul 23.02 WIB.

Salah satu contoh adalah Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam, antaranya: ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.²⁴

A.3. Pengertian Tindak Pidana Mati

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁵

Adapun menurut Moeljati²⁶ lebih umum terhadap pengertian hukum pidana yang menurut beliau adalah hukum publik yang mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penganiyaan dan lain-lain.²⁶

²⁴ Syahrudin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diakses dari <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf> pada tanggal 01 Januari 2019, Pukul 23.22 WIB.

²⁵ Abdul Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

²⁶ Moeljati, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfet*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfet* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.²⁷

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.²⁸

Pengertian tindak pidana adalah: dari kata "*Pidana*" berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Belanda disebut "*Straf*", dalam bahasa Inggris disebut "*Penalty*", artinya "hukuman".²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan dengan dua pengertian; *Pertama*, siksa dan sebagainya yang dikenakan

²⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25-26

²⁹ Pengertian Tindak Pidana Mati, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120272-T%2025470-Pro-Kontra%20Pidana-Literatur.pdf>, pada tanggal 01 Januari 2019. Pukul 22.10 WIB.

kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.

Kedua, diartikan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.³⁰

Negera Indonesia masih memberlakukan hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Diantara kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah antara lain:³¹

1. Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104). Pasal 104, "Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;
2. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (pasal 111 ayat 2). Yaitu: "Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (pasal 124 ayat:3). Yaitu: "Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan, jika si pembuat: *Pertama*, Memberitahu atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu atau tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentang tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

Kedua, Menyebabkan atau melancarkan timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang;

4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (pasal 140 ayat 3).

Yaitu "Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;

5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dulu (pasal 140 ayat 3 dan pasal 340). Yaitu: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*),

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

B.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Hukum Indonesia sebenarnya berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.³²

Menurut Wirjono Prodjodikoro³³ dalam bukunya asas-asas hukum pidana, wirjono menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* mrtupakan hal yang sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan salah satu ahli lainnya Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 69.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, Hlm. 12

adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁴

Pengertian kejahatan atau tindak pidana menurut Djoko Prakoso³⁵ tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum.

Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”³⁶

Sedangkan menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

³⁴ Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, Hlm. 72 diakses dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib>, pada tanggal 21 November 2018. Pukul 22.03 WIB.

³⁵ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

³⁶ *Ibid*

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁷

Secara historis dapat kita jumpai istilah-istilah yang sama dengan strafbaarfeit pada perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia antara lain terdapat di dalam:³⁸

1. Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1;
2. Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilanperadilan sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951;
4. Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;

³⁷ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni*, Bandung. hlm. 22

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, 1997, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 12.

5. Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum;
6. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;
7. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Muljatno berpendapat, bahwa lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁹

B.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Indonesia untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang secara teori lebih dikenal dengan istilah unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana ataupun perbuatan pidana. Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari

³⁹ Muljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. VI, Yogyakarta : Rineka Cipta, Hlm.54.

pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁰

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁴¹

Sedangkan menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.⁴²

⁴⁰ Sudarto, *Op.Cit.* Hlm 43.

⁴¹ Moeljatno, *Op.Cit.* Hlm. 57.

⁴² R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. ke-3, Jakarta : PT. Tiara, Hlm. 20.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.⁴³

B.3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.⁴⁴

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pengertian Pembunuhan berencana, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/9720/4/G.%20BAB%20II.pdf> pada tanggal 01 Januari 2019, Pukul 23.39. WIB.

yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, namun dilakukan dengan direncanakan terdahulu (*voorbgedachte rade*),⁴⁵ sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

B.4 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Sebagaimana tindak pidana yang lain, Pembunuhan berencana memiliki dua unsur yakni:

- 1) Unsur Subyektif:

⁴⁵ *Ibid*

- a. Dengan sengaja;
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu.
- 2) Unsur Obyektif:
- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk membunuh (menghilangkan jiwa seseorang) dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁴⁶

Bertitik tolak pada pengertian dan syarat unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu adalah

⁴⁶ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 78.

lain dengan terbentuknya kesengajaan. Proses terbentuknya direncanakan memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur-unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

C. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

C.1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum Pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda ketika melakukan penjajahan di bumi Nusantara. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri.⁴⁷ Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda.

⁴⁷ Prima Angkupi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, dalam Lukman Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/36258/3/jiptumppp-gdl-luqmanwahy-48124-3-babii.pdf>, pada tanggal, 02 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB.

Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁴⁸ Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.⁴⁹

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 30

⁴⁹ Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat, cetakan ketiga*, Alumni, Bandung, Hlm. 14. Dalam Lukman Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Op.Cit.*.

C.2. Hakikat Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵⁰

Adapun hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal & kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan.⁵¹

C.3. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana

Sebagaimana amanah dari pembukaan UUD NRI 1945 maka pembaharuan sebagai produk perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia menjadi prioritas bagi

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

⁵¹ Dalam Lukman Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Op.Cit.*

pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan masyarakat.

Dengan demikian diperlukan evaluasi dalam hal norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan menjadi rujukan perubahan serta perkembangan hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum pidana, usaha pembaruan hukum tersebut dimulai sejak amandemen UUD NRI 1945 yang terjadi sebanyak empat kali, namun mengingat permasalahan hukum menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas sehingga setiap saat berubah, maka pembaruan tidak dapat dilakukan dalam sekejap.

Dalam hukum Pidana sebagaimana diketahui terdapat tiga ruang lingkup pokok dalam pembaruan hukum pidana yakni:⁵²

a) Pembaruan substansi hukum pidana.

Substansi hukum pidana dapat didefinisikan sebagai produk yang dihasilkan oleh pemerintah yang berada dalam sistem hukum yang memuat keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum ini juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

⁵² Sudut Hukum, *Ruang Lingkup Pembaruan Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 20.22 WIB.

b) Pembaruan struktur hukum pidana.

Struktur hukum Pidana merupakan institusionalisasi dari lembaga hukum pidana antara lain merupakan struktur kekuasaan, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, bahkan dewasa ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa disebut sebagai entitas dari struktur hukum pidana di Indonesia, serta keberadaan Peradilan pidana yang memproses perkara pidana juga tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum pidana itu sendiri.

c) Pembaruan budaya hukum pidana.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan nilai-nilai yang erat kaitannya dengan perilaku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, serta gejala-gejala masyarakat yang timbul akibat adanya norma baru yang menjadi acuan dari pada berubahnya norma pada masa sebelumnya.